

CERITA KEBERHASILAN DARI SEKOLAH DEMOKRASI TAHUN 2009

Berikut adalah beberapa cerita keberhasilan yang berhasil dihimpun oleh beberapa Implementing Agency di laporan akhir program. Cerita keberhasilan lain masih banyak, namun belum sempat terdokumentasi dalam bentuk tulisan.

1. SEKOLAH DEMOKRASI TANGERANG

- **Gerakan untuk upah layak di Kabupaten Tangerang**

Pada Bulan Desember 2009, Peserta angkatan ke III terlibat dalam upaya mendorong lahirnya kebijakan Upah Minimum Kabupaten yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh. Peserta yang tergabung dalam Serikat Buruh seperti : Kasminah (Kord. Serikat Buruh paguyuban Karya Utama / SB PKU), Hartono (Ketua SPSI PT. Union Food), Nina Marlina (Bendahara DPC SBSI Kabupaten Tangerang), Siti Supenti (Wakil Ketua SPN Tangerang). Mereka mendorong lahirnya kebijakan kenaikan UMK dari Rp 1.110.000 menjadi Rp. 1.770.571 sesuai dengan standar yang telah disurvei Dewan Pengupahan Tangerang untuk Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Meski belum menghasilkan keputusan maksimal namun ada hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran positif, yaitu :

- Peserta angkatan III yang tergabung dalam Aliansi Buruh untuk Kenaikan Upah (ABKU) berhasil mengkonsolidir gerakan-gerakan buruh yang ada di Kabupaten Tangerang seperti KASBI, SPN, SPSI, FSPMI, SBSI, dll untuk bersama-sama menggagas besaran upah yang layak untuk para buruh dan konsep aliansi yang mampu mempertemukan buruh pada beragam isu perburuhan.
- Peserta yang tergabung dalam Aliansi ini mampu membuat pembuat kebijakan dalam hal ini Bupati Kabupaten Tangerang untuk mau secara terbuka berdialog mengenai masalah upah dan isu perburuhan di Tangerang. Semula Bupati sulit untuk terlibat dan mau berdiskusi serta menerima masukan dari Serikat-Serikat Buruh.

- **Menguatnya Jaringan dengan Pemerintah Daerah dan Partai Politik**

Kemampuan melakukan mediasi dengan melakukan dialog antar elemen ini semakin memperkuat posisi politik Sekolah Demokrasi di depan elemen yang ada. Setidaknya sebagai wahana bersama atau forum yang berperan menjadi *clearing house* atas persoalan-persoalan demokrasi di tingkat lokal, Sekolah Demokrasi telah mengambil peran yang signifikan. Secara politis, Sekolah Demokrasi juga dianggap mampu memberikan tawaran-tawaran jalan keluar atas sebuah persoalan. Walaupun tentunya tidak semuanya mampu menutup persoalan yang ada. Ini juga berdampak pada semakin menguatnya jejaring dialog antar elemen di Kabupaten Tangerang. Selain menguat, juga membuka dan memperluas akses politik yang selama ini tertutup misalnya dengan Gubernur Banten, pihak kepolisian, dan sebagainya.

Secara organisasional, kegiatan-kegiatan SD Tangerang seperti *Workshop Assessment* mengenai Pemilu 2009 dan Dialog-dialog publik memberikan pelajaran pengalaman (*lesson learn*) tentang bagaimana melakukan kerjasama dengan pihak luar. Lebih khusus adalah bekerja sama dengan birokrasi atau pemerintah. Dampaknya pada organisasi adalah kemampuannya membangun solidaritas di tingkat staf, dan memperkaya kemampuan mengorganisir acara-acara.

- **Membangun komunikasi publik dan kerjasama media**

Kegiatan-kegiatan sekolah demokrasi banyak yang bersinggungan dengan publik terutama ketika mengangkat isu-isu lokal di Kabupaten Tangerang. Dialog Publik, Talkshow Sekolah Demokrasi, dan penerbitan buletin menjadi kegiatan yang selalu dinanti pelaksanaannya. Dialog publik menjembatani keingintahuan publik mengenai isu yang sedang dibahas dengan keterangan narasumber yang berkompeten sehingga ada masukan dan rekomendasi yang ditawarkan. Selama setahun sekolah demokrasi sudah melaksanakan tiga kali dialog publik, delapan kali talkshow, dan tiga kali penerbitan. Dampak yang terasa adalah SD Tangerang makin menjadi referensi atas isu-isu yang berkembang di wilayah ini. Kerjasama dengan media juga makin intens sehingga pesan yang akan disampaikan menjadi lebih luas lagi tanggapan dan dampak positifnya.

- **Gerakan Penyelamatan Lingkungan dan Nelayan Tangerang Utara**

Peserta yang berasal dari Tangerang Bagian Utara (daerah pesisir) memelopori gerakan penghijauan, penanaman kembali hutan bakau, penyelamatan ekosistem pantai, dan penguatan organisasi nelayan. Kegiatan ini dipelopori oleh M. Ali Hutfi (Komunitas Nelayan Tradisional/KONTRAS) dan Ahmad Samsul Buldan (Kelompok Nelayan Nelayan Tangkap Maju Mandiri Mauk Tangerang) yang bekerjasama dengan organisasi lainnya seperti Sarekat Hijau, WALHI, dan Forum Masyarakat Jatiwaringin. Konsolidasi ini berhasil menyatukan gerakan masyarakat pesisir terutama nelayan Tangerang Utara untuk menyelamatkan lingkungan pesisir yang makin buruk, peningkatan Kesejahteraan nelayan dengan cara pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Bantuan dari Pemkab Tangerang, serta meningkatkan daya tawar politik masyarakat pesisir dengan membuat kontrak politik terhadap Calon Legislatif (Caleg) dari wilayah Tangerang Utara.

- **Advokasi Penyalahgunaan Situ Kelapa Dua**

Peserta melakukan Advokasi atas pemanfaatan Situ (daerah resapan) Kelapa Dua di kabupaten Tangerang. M. Iqbal Hussain (Jawa Pos Group) dan Wimphi Wibowo (Bamusi) mendorong adanya perhatian publik agar menghentikan pembangunan fisik berupa perumahan, wilayah perniagaan, dan perkantoran yang mempersempit luas Situ Kelapa Dua. Melalui pembentukan organisasi baru yaitu LMPP (Lembaga Monitoring Pelayanan Publik) peserta intens mengkampanyekan penyelamatan Situ Kelapa Dua. Hasilnya saat ini mulai ada inventarisasi kembali dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dan saat ini diambil alih oleh Pemerintah Kota Tangerang

Selatan terhadap bangunan-bangunan yang menyelahi izin disertai dengan penindakan. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan mengembalikan luas wilayah Situ kelapa Dua menjadi 3 Hektar.

- **Penanggulangan Penyakit Kaki Gajah dan Gizi Buruk di Kabupaten Tangerang**

Peserta angkatan III yang berada di wilayah Tangerang bagian Barat seperti daerah Cisoka, Cangkudu, maupun Selapajang, terlibat dalam upaya penanggulangan Penyakit kaki gajah dan gizi buruk. Grace Joice Pongilatan (Forum OTISTA) dan indah Liana Sari (FORKI Tangerang) menjadi motor dari inisiatif warga agar pemerintah lebih punya peran nyata dalam penanggualangannya. Tercatat pada tahun 2009 saja terdapat 121 pengidap kaki gajah (filariasis). Peserta melalui jaringan organisasi Orang Tua Siswa (OTISTA), jaringan POSYANDU, dan Kader Kesehatan, aktif mendorong PemKab Tangerang proaktif memberikan penyuluhan, pencegahan dini dengan vaksin, dan pengambilan sampel darah agar diketahui skala penyebarannya. Secara positif tindakan yang dilakukan peserta ini membuat pemerintah lebih proaktif dalam hal penanggulanagan kaki gajah dan gizi buruk di Kabupaten Tangerang.

- **Memperjuangkan Hak Perempuan Pekerja yang Menyusui di Pabrik**

Perempuan sebagaimana secara fisiologis memiliki saat di mana dia harus menyusui anak sementara mesti bekerja di pabrik jika ia sebagai seorang buruh. Kampanye mengenai pentingnya ASI bagi pertumbuhan bayi juga tersampaikan dan mesti menjadi perhatian untuk perempuan pekerja di pabrik-pabrik. Karena itu, peserta angkatan III yang menjadi penggiat terpenuhinya hak-hak perempuan seperti Mundiya (FSPMI) dan Nina Marlina (SBSI) menggagas adanya tempat menyusui dan penyimpanan ASI . Hasilnya adalah PT EDS Manufaktur Indonesia (PT. PEMI) menyediakan fasilitas penyimpanan air susu ibu (ASI) di pabrik dan kesempatan dan tempat untuk pekerja perempuan mengeluarkan susunya jika memang dibutuhkan.

- **Transparansi dan akuntabilitas di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan fasilitator pada proyek PNPM mandiri dan Replikasi di kabupaten Tangerang**

Proyek pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan pemerintah dengan gelontoran uang yang sangat besar rawan terjadi penyimpangan. Proyek infrastruktur seperti pembangunan fisik dan bantuan pemberdayaan ekonomi di lapangan ternyata menyimpan banyak persoalan. Yang paling disorot adalah adanya pungutan/potongan dana proyek yang begitu besar yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang ditunjuk untuk mengelola uang proyek tersebut yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Sementara itu fasilitator yang ditunjuk pemerintah untuk mendampingi BKM sering pula memanipulasi keuangan proyek.

Peserta angkatan III ada yang terlibat dalam Badan Keswadayaan Masyarakat dan yang menjadi Fasilitator program PNPM mandiri dan PNPM replikasi berupayakan mendorong adanya transparansi dan mencegah penyelewengan keuangan. Hasanuddin (ARBOMES) dan Sadruddin (PAC PPP Gunung Kaler) menjadi penggiat BKM di wilayahnya perubahan yang dilakukan adalah mendorong keterbukaan dengan forum evaluasi mingguan yang dihadiri tidak hanya oleh BKM namun juga masyarakat umum diundang. Hasilnya program yang didampinginya terutama di daerah Medang dan Gunung kaler berjalan dengan baik, partisipatoris, dan terhindarkan dari upaya kecurangan penggunaan uang program PNPM.

- **Pengorganisasian Anak Jalanan**

Kemiskinan terutama pengangguran marak terjadi di Kabupaten Tangerang. Secara kasat mata kondisi ini jelas terlihat ketika kita berada di jalan-jalan utama Tangerang. Kerumunan anak jalanan berbaur dengan debu dan lalu lintas yang padat. Kondisi ini tentu bukan hal yang ideal bagi pertumbuhan anak dan remaja. Ancaman yang dihadapi adalah kekerasan fisik, pemerasan, pelecehan seksual, hingga perdagangan anak (*child trafficking*). Peserta angkatan III juga ada yang konsern untuk melakukan pendampingan dan ikut menanggulangi masalah anak jalanan. Mukmin Kusnendar (yayasan Anak Langit) dan Kukuh Pujiyanto (PAC Partai Hanura Solear) bersama-sama mengorganisir anak jalanan.

Metode baru yang dikembangkan oleh Mukmin Kusnendar adalah kecintaan anak-anak jalanan terhadap lingkungan dan metode belajar kreatif dengan pendekatan dialog. Secara rutin Mukmin Kusnendar melaksanakan kegiatan Jambore Anak Jalanan dan juga peringatan *International Environment Day* setiap tahunnya. Kegiatan ini mendapat simpati publik Tangerang dan mendorong kesadaran bagi publik untuk ikut serta dalam bentuk relawan (*volunteer*) mendampingi anak jalanan.

Yang dilakukan oleh Kukuh Pujiyanto agak berbeda. Media yang dipakai dalam mengorganisir adalah musik. Mengumpulkan anak jalanan kemudian bermusik (didominasi oleh aliran musik *rock punk*), Kukuh melakukan transformasi nilai seperti kemauan untuk saling berbagi, mengurangi tindak kekerasan, dan menghilangkan stigma kriminal atas anak jalanan. Dampak dari kegiatan yang ia lakukan adalah ikut aktifnya anak-anak jalanan dalam kegiatan yang berkaitan dengan demokratisasi seperti keterlibatan dalam dialog publik sekolah demokrasi, kampanye keadilan dan penggalangan koin untuk Prita, gerakan anti korupsi, dll.

- **Membangun Demokrasi di Majelis Taklim**

Majelis Taklim atau yang lebih dikenal sebagai kelompok pengajian merupakan sarana berkumpul dan berdiskusi yang lazim dilakukan di masyarakat kita terutama untuk kaum perempuan. Materi yang diberikan selalu berkisar masalah Fiqh terutama yang berkaitan dengan peran perempuan dalam perspektif agama islam. Peserta Sekolah Demokrasi Angkatan III yang punya latar belakang ormas islam

seperti Siti Bilqis Rochmi (Muslimat N.U) dan Neneng Nursinah (Fatayat) mencoba melakukan pendekatan yang berbeda atas kelompok majelis taklim yang diasuh. Siti Bilqis merupakan koordinator bagi jaringan Majelis Taklim di Kabupaten Tangerang dan mengasuh lebih dari 20 Majelis Taklim. Materi yang pelan-pelan ia masukkan diantaranya di dalam pengajian diantaranya:

- Kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di ranah publik. Bahasan ini adalah isu yang sensitif tadinya namun karena ia mencoba mengkontekstkan dengan perkembangan peran perempuan saat ini maka menurutnya ada perubahan yang cukup baik dari anggota Majelis Taklim mengenai posisi perempuan dan laki-laki terutama hak dan kewajibannya.
- Mengikis apatisme politik. Saat ini kebanyakan warga menjadi apolitis dan cenderung sinis atas bekerjanya sistem politik. Sinisme ini diperlihatkan dengan menjadi golput atau tidak memilih pada saat pemilu atau menjadi pasrah dan menerima saja permainan kotor dari politisi seperti kesediaan menerima suap atau sosokan saat pemilu. Melalui pendekatan agama dan juga diskusi pentingnya demokratisasi sebagai alat perjuangan warga, ia mampu menginspirasi warganya untuk mengedepankan nilai-nilai demokrasi seperti melakukan dialog dan pelibatan perempuan dalam Musrenbang desa, menjadi mediator untuk konflik-konflik warga agar tidak terjadi kekerasan, dan membuat pendidikan anak yang tidak hanya mengedepankan aspek moral keyakinannya saja namun juga kemampuan untuk saling menghargai perbedaan.
- Mendorong lahirnya kesadaran mengenai lingkungan hidup dengan jalan menanam pepohonan di pekarangan dan memanfaatkan lahan yang tersisa dengan tanaman obat untuk keluarga (TOGA). Penghijauan ini dipandang memiliki manfaat mengurangi kenaikan suhu di Tangerang karena aktifitas industri dan kendaraan bermotor yang membuang emisi berbahaya bagi makhluk hidup. Di akhir tahun 2009, Majelis taklim perempuan yang tergabung dalam ormas Muslimat N.U bekerjasama dengan Pemkab Tangerang dan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk penanaman seribu pohon di Tangerang.

2. SEKOLAH DEMOKRASI JENEPONTO

- a. Kelompok civil society semakin intensif dalam berpartisipasi memantau berbagai kebijakan dan terlibat dalam berbagai perumusan kebijakan pembangunan. Saat ini misalnya telah muncul perda tentang partisipasi publik dan transparansi. Sekarang sedang di lanjutkan untuk membentuk komisi transparansi dan partisipasi publik. Yang mendorong ini adalah kelompok civil society di tingkat lokal, yang rata-rata dari mereka pernah mengikuti sekolah demokrasi. Saat ini, kelompok-kelompok ini bersama alumni sekolah demokrasi (KK) sedang melakukan advokasi terhadap adanya indikasi korupsi yang ditemukan oleh hasil audit BPK.
- b. Dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu presiden. Jeneponto adalah daerah yang dikhawatirkan terjadi konflik. Dalam pernyataannya di media Gubernur Sulsel menyatakan bahwa kalau di jeneponto pemilu aman, maka di daerah lain juga pasti aman. Ini menunjukkan bahwa gubernur sendiri paling mengkhawatirkan konflik

muncul di Jenepono. Sekolah demokrasi menyikapi hal ini dengan melakukan berbagai dialog. Dialog dilakukan di radio dengan model talk show, pihak-pihak terkait diminta bicara dan menekankan pentingnya penyelesaian masalah pemilu dengan cara-cara damai. Selain itu juga diadakan dialog publik, yang meski tidak spesifik mengambil tema mengenai soal kemungkinan konflik ini, tapi dalam pembahasan di dialog publik itu, persoalan ini juga menjadi penekanan. Demikian halnya dalam pelaksanaan sekolah demokrasi, peserta sekolah demokrasi khususnya yang berasal dari partai politik di beri penekanan untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai dan melalui jalur-jalur konstitusional. Faktanya pada saat penyelenggaraan pemilu, baik legislatif maupun pemilihan presiden, konflik yang mengarah pada tindak kekerasan tidak terjadi. Memang saat itu beberapa kelompok yang kecewa dengan hasil pemilihan legislatif. Mereka protes dan melakukan aksi, tapi semuanya dapat dilakukan dengan damai tanpa tindakan kekerasan. Menurut Abustam Edi, peserta SD, yang mengkoordinir gerakan ini atas nama partainya, ia dan peserta SD lainnya yang terlibat dalam gerakan ini senantiasa mengingatkan rekan-rekannya agar tidak bertindak anarkis, apalagi melakukan tindakan kekerasan. Aksi-aksi yang mereka lakukan akhirnya berjalan baik dan santun tanpa tindakan kekerasan sama sekali.

- c. Di tiap kecamatan yang ada peserta Sekolah Demokrasinya telah dibentuk kelompok kecamatan. Saat ini kelompok kecamatan, telah merancang diskusi kampung dan mencoba membangun blok politik demokratik di daerahnya. Proses ini masih berlangsung saat ini dan dikonsolidasikan terus-menerus oleh LAPAR.

3. SEKOLAH DEMOKRASI BANYUASIN

- **Wahono Mendadak Menjadi Konsultan Politik di Desa**

Wahono adalah peserta SDB angkatan III Tahun 2009 berasal dari pelaku bisnis. Ketika dilaksanakan kegiatan *Leader Community Meeting* (LCM) di desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dalam kegiatan itu Wahono bertindak selaku ketua pelaksana kegiatan LCM, juga sebagai narasumber dalam membahas masalah sengketa lahan di desa Pangkalan Benteng. Dari kegiatan LCM inilah, kemudian berkembang lahirnya komunitas masyarakat Desa Pangkalan Benteng yang memperjuangkan lahannya yang diklaim oleh sebuah perusahaan Sawit. Rencana aksi besar-besaran dirancang yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa setempat, juga didukung oleh Kepala Desa Pangkalan Benteng. Rencana aksi ini tercium oleh Camat yang kemudian meminta agar membatalkan aksi dengan jaminan dapat mempertemukan masyarakat dengan Bupati Banyuasin, Amiruddin Inoed. Kasus ini kemudian bergulir, dan kini dalam tahap penyelesaian. Dari penanganan kasus sengketa lahan inilah kemudian Wahono dikenal oleh tokoh-tokoh masyarakat desa Pangkalan Benteng sebagai konsultan politik di desa. Setiap ada permasalahan yang bertalian dengan pemerintahan, Wahono senantiasa diminta pendapatnya.

- **Wikanti: Sosok Srikandi Multikultural**

Wikanti adalah peserta SDB yang satu-satunya beragama katolik dan berasal dari Jawa. Setiap hari Minggu, dia senantiasa menjalankan keyakinannya ke Gereja. Usai kebaktian, dia segera mengikuti pembelajaran berikutnya. Namun, yang

menarik dari Wikanti adalah kemampuannya beradaptasi dengan peserta SDB yang mayoritas beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Wikanti mampu melintasi batas-batas ras, agama, dan suku. Hal ini tercermin dari perhualannya yang tak canggung dengan peserta SDB lainnya. Karena itu dia kerap dijuluki sebagai **“Srikandi Multikultural”**. Kehadiran Wikanti di Sekolah Demokrasi Banyuasin, paling tidak, memberikan warna tersendiri dalam relasi antar sesama yang dilingkupi kebhenekaan budaya (pluralisme)

- **Mashuri : Dari Berpikir Otoriter Ke Berpikir Demokratis**

Mashuri adalah sosok peserta SDB yang senantiasa mendominasi kelas dengan cara berpikir yang otoriter. Seolah-olah kebenaran yang diyakininya adalah satu-satunya kebenaran. Dalam dua bulan proses pembelajaran SDB, warna berpikir otoriter itu senantiasa mewarnai kelas. Seolah-olah pemikiran peserta SDB lainnya berada dalam posisi yang keliru. Hal ini, pada dasarnya, mencerminkan belum pemahannya mengenai nilai-nilai demokratis. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena dapat mengannggu suasana belajar yang memegang prinsip demokratis, kesetaraan, dan menghargai pendapat orang lain, maka Tarech Rasyid, Koordinator Program Sekolah Demokrasi Banyuasin, melakukan perdebatan mengenai teori-teori kebenaran, bahkan memasuki wilayah filosofis tentang epistemology Barat dan Islam. Karena berbagai argumennya dapat dipatahkan, maka Mashuri pun tak dapat mempertahankan pandangannya yang sempit mengenai kebenaran. Dari perdebatan terbuka inilah kemudian Mashuri mengubah cara berpikirnya yang lebih demokratis. Perubahan ini merupakan perubahan nilai, juga merupakan perubahan wacana mengenai demokrasi, setidaknya dalam konteks yang lebih kecil di level komunitas Sekolah demokrasi Banyuasin.

- **Zainal Pahdi: Dari Berbicara Tanpa Konsep Ke Bicara Dengan Konsep**

Peserta SDB angkatan III Tahun 2009 ini merupakan sosok petani yang kerap berbicara tanpa konsep, hanya mengandalkan comon sense. Setelah empat bulan mengikuti pembelajaran SDB, dia mulai berbicara dengan menggunakan konsep-konsep yang semula asing bagi dirinya. Hal ini terlihat dalam diskusi kelompok atau dalam curah pendapat dengan nara sumber. Selain itu, dialek bicarannya yang masih kental dengan bahasa lokal, kini dia mampu menggunakan bahasa Indonesia. Kemampuan bicarannya dengan konsep semakin menonjol ketika dia menjadi narasumber dalam kegiatan talkshow radio di Banyuasin. Dia banyak menjelaskan dengan menggunakan konsep-konsep yang telah diperoleh di ruang kelas, bahkan dia pun menggunakan konsep-konsep dari bahan bacaannya melalui koran.

- **Tawaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap Alumni**

Selama proses pembelajaran SDB di Banyuasin, pemerintah Kabupaten Banyuasin terkesan tidak memberi perhatian. Hal ini juga diakui oleh Wakil Bupati Banyuasin dalam sambutannya di Wisuda SDB Angkatan III. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengharapkan alumni SDB dapat menjalankan perannya melakukan demokratisasi di Banyuasin dan menawarkan alumni SDB yang tergabung dalam KKDB untuk melakukan audiensi dan mengajukan program kepada Pemkab bersama-sama membangun demokrasi di Banyuasin.